

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Literatur Review**

Dalam menyusun sebuah karya ilmiah tentunya tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Literatur Review merupakan uraian tentang teori, temuan atau bahan penelitian lainnya yang didapatkan dari bahan acuan untuk dijadikan sebagai landasan kegiatan penelitian dalam menyusun kerangka pemikiran yang jelas dari rumusan masalah yang akan diteliti guna mengklarifikasi sumber-sumber yang dikaji oleh penulis dalam penelitian.

Dalam penelitian ini penulis berusaha untuk mengumpulkan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik atau masalah yang diangkat pada penelitian. Adapun literature-literatur yang diperoleh sebelumnya bersumber dari jurnal ilmiah, sumber online, berita resmi, skripsi dan hasil laporan penelitian. Tujuan literature review dari penelitian penulis adalah untuk memberikan gambaran mengenai Pengaruh nilai-nilai demokrasi liberal dan implikasinya bagi tindakan rasialisme di Amerika Serikat.

Selain itu fungsi dari literatur review yaitu menjelaskan secara rinci antara variable bebas, varibel terikat dan hubungannya diantara kedua variable tersebut. Dan juga untuk menghindari kemungkinan adanya tindakan plagiarisme. Dengan adanya

literature review ini dapat memudahkan penulis dalam menyusun karya ilmiah (skripsi).

Beberapa Literatur Review yang dijadikan sebagai rujukan penulis sebagai alat bantu dalam menyusun penelitian, diantaranya sebagai berikut:

1. Buku yang berjudul **Dasar – Dasar Ilmu Politik** yang ditulis oleh Prof. Miriam Budiardjo. Dalam buku ini dijelaskan bagaimana sebuah konsep demokrasi sebagai acuan sistem pemerintahan berbagai negara di dunia. Beberapa contoh demokrasi di dunia bermacam-macam seperti demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Dalam hakikatnya, demokrasi konstitusional ini ialah gagasan bahwa pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenangnya terhadap warga negaranya. Dalam pembahasan ini bagaimana dijelaskan demokrasi di Amerika Serikat yang saat ini mengalami kemunduran akibat tindakan rasialisme yang terjadi di Amerika Serikat. Tentu sebagai *Mother of Democracy* Amerika Serikat dinilai gagal dalam pelaksanaan nilai nilai demokrasi liberalnya yang seharusnya menjunjung tinggi kebebasan dan kesejahteraan masyarakatnya. Disinilah penulis memakai literature ini sebagai perbandingan demokrasi yang seharusnya dan demokrasi di Amerika Serikat saat ini.
2. Jurnal yang berjudul **Deklarasi Universal Hak-Hak Manusia 1948** yang ditulis oleh Majelis Umum PBB. Jurnal ini membahas pedoman sekaligus standar minimum yang dicita-citakan oleh seluruh umat manusia. Maka dari itu

berbagai hak dan kebebasan dirumuskan secara luas, seolah-olah bebas tanpa batas. Satu-satunya pembatasan yang tercantum dalam pasal terakhir nomor 29 bahwa:

*“Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakatnya dan bahwa dalam pelaksanaan hak-hak dan kekuasaan-kekuasaannya setiap orang hanya dapat dibatasi oleh hukum yang semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak atas hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dalam rangka memenuhi persyaratan-persyaratn yang adil dalam hal moralitas, kesusilaan, ketertiban hukum dan kesejahteraan umum yang adil dalam masyarakat demokratis”*

Sekalipun sifatnya tidak mengikat secara yuridis, namun deklarasi ternyata mempunyai pengaruh moral, politik dan edukatif yang tiada tara.

3. Jurnal yang berjudul **Krisis Legitimasi Politik Donald Trump Sebagai Ancaman Supremasi Amerika Serikat Dalam Politik Global** yang ditulis oleh Ahmad Sahide. Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana kebijakan Donald Trump yang menimbulkan kekhawatiran dalam dunia politik global terutama kebijakan nasionalisme yang dianggap merugikan dan memunculkan kasus-kasus diskriminasi terhadap kaum minoritas di Amerika Serikat. Donald Trump sebagai sosok yang tentu dipandang mengerikan oleh masyarakat minoritas di Amerika Serikat. Menurut William Liddle, keadaan saat Donald Trump menjabat menjadi presiden tentu membuat *Clash of Civilization* yang diartikan bahwa makin adanya sentimen buruk kepada para imigran. Itulah

mengapa kemenangan Donald Trump dinilai sebagai titik kemunduran demokrasi di Amerika Serikat. Pernyataan Donald Trump dan langkah politik Trump yang notabene diartikan sebagai anti imigran dan islamophobia, tentu makin membuat memanas hubungan antara barat dan dunia islam.

## **2.2 Kerangka Teoritis**

Kerangka Teori adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan landasan berfikir untuk melakukan sebuah penelitian atau mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Penulis perlu mengemukakan teori dan konsep dari para ahli yang berhubungan dengan objek penelitian untuk menyimpulkan hipotesis dan menjelaskan variabel bebas maupun terikat dari penelitian ini. Selain itu untuk memahami fenomena hubungan internasional yang sesuai dengan judul penelitian ini.

### **2.2.1 Demokrasi**

Secara harfiahnya, demokrasi berasal dari kata *Demos* yang artinya adalah rakyat dan *Cratein* yang artinya pemerintahan. Maka secara keseluruhan demokrasi yaitu pemerintahan oleh rakyat yang dimana kekuasaan tertinggi yaitu ada di tangan rakyat dan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung atas dasar sistem perwakilan. Asas dari demokrasi dalam pengertiannya tidak terjadi perubahan dalam sejarah demokrasi, yaitu sistem pemerintahan yang dipegang oleh rakyat ataupun dalam proses pemerintahan harus adanya keikutsertaan rakyat dalam memberikan

keputusan politik maupun permasalahan negara dan kebijakan negara. Menurut Huntington, konsep demokrasi yang melekat saat ini yaitu:

**“Pertama, demokrasi bukan hanya bentuk pemerintahan yang dapat diterima, tapi juga merupakan suatu doktrin politik yang akan menguntungkan banyak Negara. Kedua, demokrasi sebagai sistem politik dan pemerintahan mempunyai akar sejarah jaman Yunani kuno dan sebagai bentuk ideal yang mampu bertahan selama beberapa abad dalam suasana politik penuh dengan gejolak. Ketiga, demokrasi dipandang sebagai suatu sistem yang natural, dalam arti jika rakyat di Negara manapun bisa memenangkan kebebasannya untuk menentukan sendiri sistem politiknya, besar kemungkinan mereka akan memilih demokrasi”**

Demokrasi sebagai tatanan politik adalah sebuah model yang tepat dalam mengelola pemerintahan maupun kehidupan masyarakatnya. Akan tetapi, demokrasi bukanlah satu-satunya model yang sempurna dalam mengatur masyarakat, dalam sejarahnya menunjukkan, demokrasi memiliki peluang kecil dalam menistakan manusia. Dalam artiannya yaitu terkadang dalam demokrasi yang bersifat otoriter karena memiliki kekuasaan yang lebih sehingga mampu merugikan kehidupan masyarakat di dunia. (Hertanto, 2006)

### **2.2.2 Demokrasi Liberal**

Demokrasi Liberal atau Liberalisme dipahami sebagai sistem pemerintahan yang dimana rakyat memilih dan mengawasi pemerintah yang berkuasa secara konstitusional terbatas dan mampu memperhatikan nilai-nilai hak individu. Demokrasi

Liberal adalah bentuk pemerintahan yang berada dalam prinsip-prinsip Liberalisme yang artinya mampu melindungi hak-hak kebebasan masyarakatnya yang tertera pada hukum yang berlaku.

Demokrasi Liberal ditandai dengan adanya sebuah pemilihan umum yang berasaskan adil dan bebas, serta memiliki kompetitif dari berbagai peserta pesta politik yang akan dipilih oleh rakyat. Demokrasi Liberal terbentuk dari sebuah doktrin dan perkembangan konstitusional dari waktu ke waktu.

Sistem Demokrasi Liberal ini telah berkembang sejak periode modern yang dimulai pada abad ke 17. Filsuf inggris, John Locke berpendapat bahwa pemerintah yang sah adalah pemerintahan yang berasal dari persetujuan dan hak untuk menyetujui. Bagi Locke, keadaan alami dari sebuah pemerintahan adalah sebuah keadaan dimana makhluk dengan spesies dan tingkatan yang sama juga harus setara satu sama lain tanpa adanya subordinasi atau subjeksi. (Fauzi, 2020)

Menurut Locke:

**“Karena manusia pada dasarnya sama dengan politik (walaupun tidak sama dalam suatu hal), satu-satunya cara dimana seseorang memperoleh otoritas politik yang sah atas yang lain adalah melalui persetujuan pihak lain.”**

Pemerintah akan dinyatakan sah dalam menjalankan pemerintahan apabila telah mampu melindungi hak-hak masyarakatnya berupa hak untuk hidup, hak untuk bebas dan hak untuk property.

### **2.2.3 Hak Asasi Manusia**

Dalam terminologinya, HAM dikenal dengan 4 istilah yaitu *Human Rights*, *Fundamental Rights*, *Citizen Right*, *Collective Rights*. Dari keseluruhannya menjelaskan bahwa Hak Asasi Manusia adalah suatu hak yang harus diperoleh dan dijaga oleh beberapa orang bahwasanya manusia adalah makhluk yang bebas dan tidak dapat dikekang. (Kusnardi, 1988)

### **2.2.4 Rasisme**

Rasisme memiliki pengertian yaitu perilaku dalam membedakan suatu ras tertentu dan menganggap rendah suatu ras yang menyebabkan diskriminasi dalam kehidupan bernegara. Dalam perilaku ini tentu mampu membuat ras tertentu tidak mendapatkan hak untuk hidup secara aman dan sejahtera. Konsep rasialisme menurut Gelman dan Wellman yaitu:

**“Rasis merupakan ciri atas individu yang mementingkan asas-asas esensialisme subjektif. Dalam hal ini, esensialisme subjektif merupakan salah satu kepercayaan dari pemikiran bahwa anggota dari suatu kelompok atau ras memiliki banyak kemiripan diluar, tetapi semuanya mengakui bahwa ada ciri-ciri dasar yang membedakan antara satu individu dengan individu yang lain.”**

Ciri-ciri tersebut mencakup aspek biologis yang dimana timbul sebuah superioritas dan minoritas dalam sebuah pemikiran yang membeda-bedakan warna kulit, agama maupun ras sehingga menciptakan sebuah penolakan terhadap kaum minoritas. (Wellman, 2014)

### **2.2.5 Nasionalisme**

Nasionalisme adalah suatu paham yang dimana mengajarkan untuk mencintai bangsa dan negara atas kesadaran sendiri secara potensial dalam menjaga keutuhan negara serta mempertahankan suatu identitas, integritas maupun kemakmuran negara. Nasionalisme merupakan paham yang memuat kesatuan dan persatuan bangsa dan dapat diartikan sebagai cinta tanah air. Menurut John Hutchinson:

**“Nasionalisme lebih merupakan sebuah fenomena budaya daripada sebuah fenomena politik karena berakar pada etnisitas dan budaya promodern, walaupun nasionalisme bertransformasi sebagai gerakan politik, hal tersebut bersifat superfisial karena gerakan-gerakan politik nasionalisme dan pada akhirnya dilandasi oleh motivasi budaya, khususnya saat terjadi krisis identitas kebudayaan.”**

Karena pada dasarnya, nasionalisme yang muncul ditiap-tiap negara memiliki tujuan sebagai kekuatan dalam mempertahankan suatu kebudayaan yang telah lama dianut dari masuknya hal-hal yang berbau globalisasi. (Hutchinson, 2000)



### 2.2.6 Partisipasi Politik

Definisi dari partisipasi politik itu sendiri adalah kegiatan individu atau kelompok untuk ikut serta dalam kehidupan politik, seperti memilih pemimpin pemerintahan ataupun mempengaruhi sebuah kebijakan pemerintahan secara langsung ataupun tidak langsung. Contoh dalam partisipasi politik yaitu mengikuti pemilihan umum, menghadiri sebuah rapat umum maupun melakukan gerakan sosial seperti demo ataupun hal yang bersifat memprotes apabila kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan negara.

**“Partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi politik bisa bersifat individual atau kolektif terorganisir secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal dan efektif atau tidak efektif.”**

Dari penjelasan tersebut, partisipasi politik erat sekali dengan kesadaran politik. Perasaan kesadaran seperti ini dapat dimulai dengan melakukan sebuah pendidikan maupun analisis sebuah kebijakan yang dimana apakah itu baik untuk negara ataupun buruk.

### 2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas pernyataan penulis yang masih diuji kebenarannya berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan. Berdasarkan kerangka teori diatas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

**“Jika Kebijakan Nasionalisme dan Anti Imigran Presiden Donald Trump bertentangan dengan Hak Asasi Manusia serta cenderung Diskriminatif, Maka muncul Tuntutan serta Partisipasi Politik yang Bersifat Reaksioner sebagai Gejala dan Kecenderungan dari Realitas Sosial-Politik Nilai-Nilai Demokrasi Liberal warga Negara di Amerika Serikat”**

## 2.4 Verifikasi Variabel dan Indikator

Variabel dalam Hipotesis (Teoritik)	Indikator (Empirik)	Verifikasi (Analisis)
Variabel bebas: Pengaruh Nilai-Nilai Demokrasi Liberal di Amerika Serikat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sejarah Liberalisme di Amerika Serikat yang berkembang hingga saat ini</li> <li>2. Budaya Politik Liberal yang di anut oleh masyarakat Amerika Serikat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Muhammad Nasir Badu, 2015 <a href="http://journal.unhas.ac.id/index.php/politics/article/download/126/pdf">http://journal.unhas.ac.id/index.php/politics/article/download/126/pdf</a> 30 Juli 2020</li> <li>2. Muhammad Nasir Badu, 2015 <a href="http://journal.unhas.ac.id/index.php/politics/article/download/126/pdf">http://journal.unhas.ac.id/index.php/politics/article/download/126/pdf</a> 30 Juli 2020</li> </ol>

<p>Variabel Terikat:</p> <p>Implikasi terhadap tindakan Rasialisme di Amerika Serikat</p>	<p>1. Kebijakan Nasionalisme (Whitesupremacy) Donald Trump dianggap menimbulkan tindakan diskriminasi</p> <p>2. Terjadinya gerakan Black Lives Matter di Amerika Serikat.</p>	<p>1. <a href="https://kumparan.com/sha-msi-ali/white-supremacy-dan-ancaman-global-1553045124603656202">https://kumparan.com/sha-msi-ali/white-supremacy-dan-ancaman-global-1553045124603656202</a> 30 Juli 2020</p> <p>2. <a href="https://www.bbc.com/indonesia/majalah-53175108">https://www.bbc.com/indonesia/majalah-53175108</a> 30 Juli 2020</p>
---	---	---

Table 1 Verifikasi Variabel dan Indikator

## 2.5 Skema dan Alur Penelitian

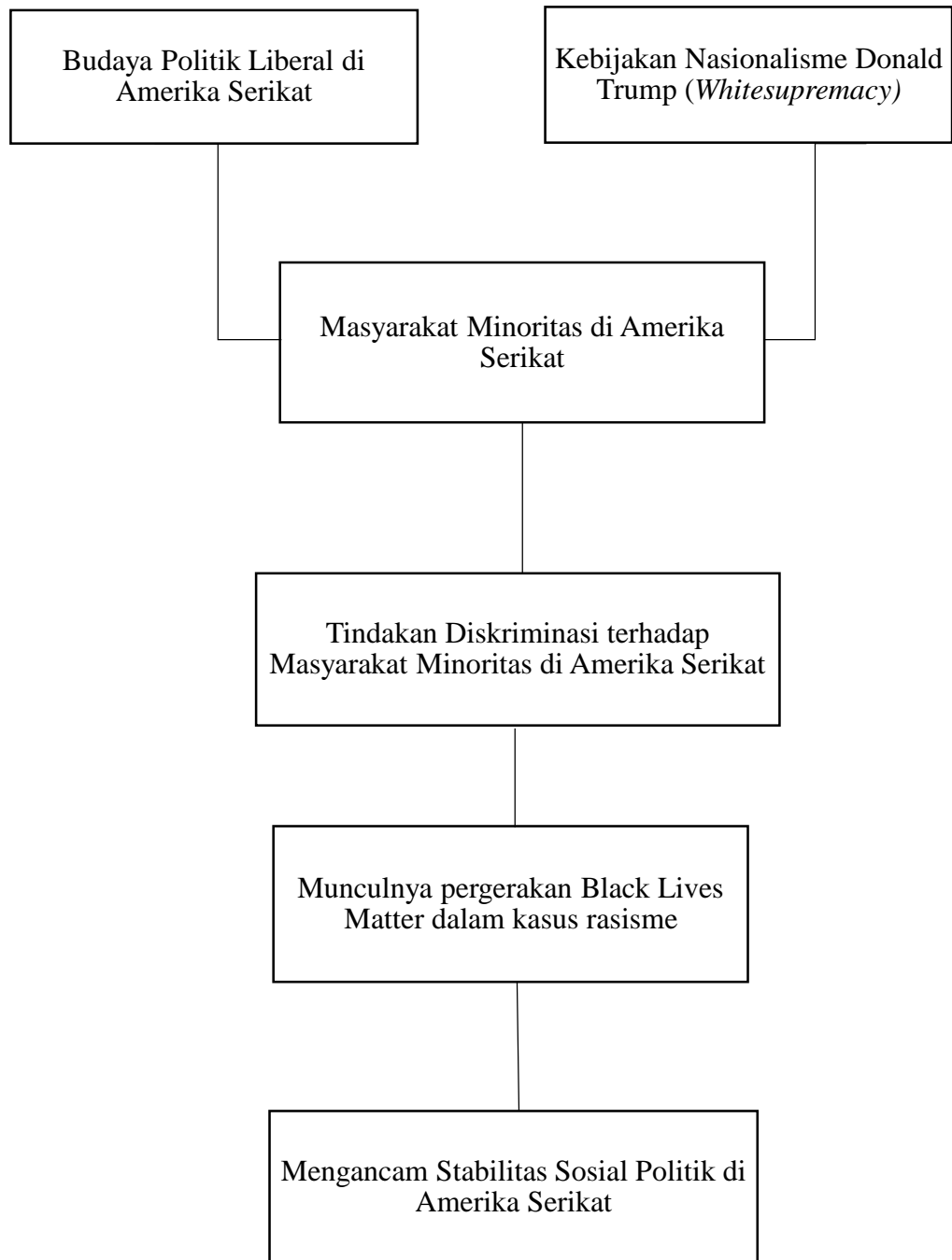


Table 2 Skema dan Alur Penelitian